



Kondisi Kependudukan di Jatim Jauh dari Ideal

Komisi E DPRD Jatim Kunjungi Transmigran di Sultra

Mengintip Seleksi Penerimaan Polisi



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
JL. DUKUH MENANGGAL 124 - 126 TELP. (031) 8290005 - 82802254 FAX. (031) 8292996
SURABAYA - 60234**



Dampak Mobilitas Penduduk sebagai Akselerator Pembangunan Ekonomi

Oleh :

Ignatia Martha Hendrati, Ikatan Doktor Ekonomi Indonesia

Pelaku mobilitas penduduk adalah orang yang melakukan mobilitas, sedangkan mobilitas adalah proses gerak penduduk dari suatu wilayah menuju wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Mobilitas penduduk dapat dibedakan antara mobilitas penduduk vertikal dan mobilitas penduduk horizontal. Mobilitas penduduk vertikal sering disebut dengan perubahan status, dan salah satu contohnya adalah perubahan status pekerjaan. Seseorang yang mula-mula bekerja dalam sektor pertanian sekarang bekerja dalam sektor non pertanian. Mobilitas penduduk horizontal, atau mobilitas penduduk geografi adalah gerak (movement) penduduk yang melintas batas wilayah menuju ke wilayah yang lain dalam periode waktu tertentu (Mantra, 1978). Penggunaan batas wilayah dan waktu untuk indikator mobilitas penduduk horizontal ini mengikuti paradigma ilmu geografi yang mendasarkan konsepnya atas wilayah dan waktu (space and time concept). Batas wilayah umumnya digunakan batas administratif, misalnya propinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, pedukuhan (dusun). Naim (1979) dalam penelitiannya mengenai mobilitas penduduk suku Minangkabau menggunakan batas budaya Minang sebagai batas wilayah. Hingga kini belum ada kesepakatan di antara para ahli dalam menentukan



batas wilayah dan waktu tersebut.

Sebagai contoh, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melaksanakan Sensus Penduduk di Indonesia menggunakan batas propinsi sebagai batas wilayah, sedangkan batas waktu digunakan enam bulan atau lebih.. Jadi, menurut definisi yang dibuat oleh BPS, seseorang disebut migran apabila orang tersebut bergerak melintasi batas propinsi menuju ke propinsi lain, dan lamanya tinggal di propinsi tujuan adalah enam bulan atau lebih.

Alasan lain pengambilan enam jam ialah untuk menjangkau orang-orang yang melakukan mobilitas ulang alik (Jawa= nglaju) atau commuting. Jika dilihat dari ada tidaknya niatan untuk menetap di daerah tujuan, mobilitas penduduk dapat pula dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas penduduk permanen atau migrasi dan mobilitas penduduk nonpermanen. Jadi, migrasi adalah gerak penduduk yang melintas batas wilayah asal menuju ke wilayah lain dengan ada niatan menetap di daerah tujuan. Sebaliknya, mobilitas penduduk





nonpermanen ialah gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tidak ada niatan menetap di daerah tujuan. Apabila seseorang menuju ke daerah lain dan sejak semula sudah bermaksud tidak menetap di daerah tujuan, orang

tersebut digolongkan sebagai pelaku mobilitas nonpermanen walaupun bertempat tinggal di daerah tujuan dalam jangka waktu lama (Steele, 1983). Gerak penduduk yang nonpermanen (sirkulasi, circulation) ini dapat pula dibagi menjadi dua yaitu ulang alik (Jawa=nglaju, Inggris= commuting), dan dari daerah asal menuju ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari itu juga. Pada umumnya penduduk melakukan mobilitas ingin kembali ke daerah asal secepatnya sehingga apabila dibandingkan frekuensi penduduk yang melakukan mobilitas ulang alik, menginap/mondok, dan migrasi, frekuensi mobilitas ulang alik terbesar disusul oleh menginap/mondok dan migrasi. Secara operasional, macam-macam bentuk mobilitas penduduk tersebut diukur berdasarkan konsep ruang dan waktu. Misalnya mobilitas ulang alik, konsep waktunya diukur dengan enam jam atau lebih meninggalkan daerah asal dan kembali pada hari yang sama; menginap/mondok diukur dari lamanya meninggalkan daerah asal lebih dari satu hari, tetapi kurang dari enam bulan; sedangkan mobilitas permanen diukur dari lamanya meninggalkan daerah asal enam bulan atau lebih kecuali orang yang sudah sejak semula berniat menetap di daerah tujuan

seperti seorang istri yang berpindah ke tempat tinggal suami.

Ada beberapa teori yang mengatakan mengapa seseorang mengambil keputusan melakukan mobilitas, di antaranya adalah teori kebutuhan dan stres (Maslow and stress). Setiap individu mempunyai kebutuhan yang perlu dipenuhi. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Apabila kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi, timbul stres. Tinggi rendahnya stres yang dialami oleh individu berbanding terbalik dengan proporsi pemenuhan kebutuhan. Ada dua akibat dari stres, yaitu jika *seseorang tidak terlalu besar (masih dalam batas toleransi)*, orang tersebut tidak akan pindah. Dia tetap tinggal di daerah asal dan menyesuaikan kebutuhannya dengan keadaan lingkungan yang ada. Apabila stres yang dialami seseorang di luar batas toleransinya, orang tersebut mulai memikirkan untuk pindah ke daerah lain di tempat kebutuhannya dapat terpenuhi. Atau dengan ungkapan lain, seseorang akan pindah dari daerah yang mempunyai nilai kefaedahan wilayah (place utility) lebih rendah ke daerah yang mempunyai kefaedahan wilayah lebih tinggi di mana kebutuhannya dapat terpenuhi.

Perpindahan penduduk pedesaan ke perkotaan disebabkan oleh beberapa hal seperti keinginan masyarakat pedesaan yang ingin memperbaiki kualitas hidup di kota, ingin memperoleh status sosial yang lebih tinggi, memperoleh pendidikan yang lebih baik dan sebagainya. Surabaya sebagai kota metropolitan memiliki daya tarik tersendiri bagi para urban yang tidak hanya berasal dari daerah hinterland tetapi juga berasal dari daerah yang jauh seperti pesisir selatan dan wilayah timur yang letaknya sangat jauh dari Surabaya. Dalam proses urbanisasi dikenal adanya tiga macam proses, yakni:





1. Centripetal process : the flow of people from country sides to the urban area accompanied with the change in behavior.

Dalam proses ini terjadi aliran penduduk dari wilayah desa atau kota satelit menuju ke wilayah pusat kota yang diikuti oleh perubahan pola perilaku desa-tradisional dengan perilaku kota-modern. Sebab-sebab aliran penduduk dari desa ke kota ini dapat digolongkan menjadi dua macam, yakni: (1) push factors (faktor pendorong), dan (2) pull factors (faktor penarik). Faktor-faktor pendorong meliputi kondisi desa yang menjadikan orang tidak mau lagi tinggal di desa, seperti: minimnya lapangan kerja, kekangan adat, kurangnya variasi hidup, sempitnya kesempatan menambah pengetahuan, kurangnya sarana rekreasi ataupun sempitnya kesempatan mengembangkan keahlian dan ketrampilan.

Sedangkan faktor penarik meliputi kondisi kota yang menjadikan orang-orang tertarik untuk tinggal menetap di kota, seperti: kesempatan kerja yang lebih luas, luasnya kesempatan mengembangkan ketrampilan dan keahlian, kesempatan dan fasilitas pendidikan yang lebih memadai, kelebihan modal, variasi hidup, banyaknya tempat hiburan, kebebasan hidup di kota dan anggapan bahwa kota memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi daripada desa.

Everett S. Lee (1976) dalam tulisannya berjudul *A Theory of Migration* mengungkapkan bahwa volume migrasi di suatu wilayah berkembang sesuai dengan tingkat keanekaragaman daerah di wilayah tersebut. Di daerah asal dan daerah tujuan ada faktor-faktor positif (+), negatif (-), ada pula faktor-faktor netral. Faktor positif adalah faktor yang memberikan nilai menguntungkan kalau bertempat tinggal di daerah itu, misalnya di daerah tersebut terdapat sekolah, kesempatan kerja, atau iklim yang baik. Faktor negatif adalah faktor yang memberikan nilai negatif pada daerah yang bersangkutan sehingga seseorang ingin

pindah dari tempat tersebut karena kebutuhan tertentu tidak terpenuhi. Perbedaan kumulatif antara kedua tempat tersebut cenderung menimbulkan arus migrasi penduduk.

2. Centrifugal process : urban extention in terms of physical, economic, technology and culture.

Dalam proses ini yang terjadi adalah meluasnya pengaruh kehidupan kota ke wilayah-wilayah pinggiran kota, dapat berupa perluasan fisik kota yang diikuti oleh perubahan kehidupan ekonomi, penggunaan teknologi maupun perubahan kebudayaan.

3. Vertical process : social, economic, culture, and behavior

Dalam proses ini yang terjadi adalah perubahan situasi atau iklim desa (rural sphere) menjadi kota (urban sphere), baik secara sosial, ekonomi, kebudayaan dan perilaku. Keadaan ini dapat terjadi antara lain oleh sebab-sebab: daerah itu menjadi pusat pemerintahan, letaknya strategis untuk perdagangan, dan tumbuhnya industri



Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "people centred, participatory, empowering, and sustainable" (Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki "inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity". (Kartasasmita, Ginanjar 1997)

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu (Sumodiningrat, Gunawan, 2002) ; Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang

(enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses

pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Di samping itu, dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga mereka dapat merasa ikut bertanggung jawab dan merasa memiliki program-program pembangunan yang jelas akan sangat menguntungkan bagi pelaksanaannya. Oleh karena itu, pentingnya partisipasi



masyarakat dalam pembangunan merupakan fenomena yang tak dapat diabaikan dan sangat bernilai bagi keberhasilan suatu pembangunan. Partisipasi masyarakat akan mendorong perencanaan anggaran dan program-program atau kegiatan-kegiatan yang akan diimplementasikan akan berjalan secara transparan. Dengan adanya transparansi tersebut akan mendorong pertanggungjawaban para aparatur terkait dengan anggaran dan program-program yang telah dilaksanakan tersebut. Ini menunjukkan dengan adanya partisipasi akan membuka upaya transparansi, akuntabilitas dan keadilan. (Rajab, Untung dan Hendrati, 2011)

Peran SDM sebagai akselerator pembangunan ekonomi dapat dijelaskan dengan teori yang disampaikan oleh banyak ahli. Menurut Smith, pertumbuhan output dapat diperbaiki dengan meningkatkan penggunaan input dan peningkatan efisiensi penggunaan input. Peningkatan penggunaan input mencakup peningkatan penggunaan Sumber Daya Manusia dan barang modal. Perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan melakukan spesialisasi tenaga kerja (division of labour). Selanjutnya, Smith menyatakan bahwa division of labour dan spesialisasi tidak terlalu berguna tanpa ada proses pertukaran (exchange).*

